



BANK BPD DIY KOMITMEN DUKUNG PERCEPATAN DIGITALISASI DAERAH

# Transparansi Keuangan, Pemkot Yogya Gunakan KKPD

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya resmi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) untuk memperkuat transparansi pengelolaan keuangan. Langkah tersebut sekaligus sebagai upaya percepatan digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogya Patricia Heny Dian Anitasari, mengungkapkan sebelumnya sudah dilakukan pilot project atau percontohan dalam penggunaan KKPD di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemkot Yogya. "Penggunaan KKPD juga menjadi prasyarat dalam evaluasi Rapda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KKPD menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi belanja pemerintah pusat dan daerah," katanya

dalam High Level Meeting (HLM) sekaligus peluncuran penggunaan KKPD di komplek Balaikota Yogya, Kamis (29/2). HLM kemarin diikuti berbagai unsur mulai Bank Indonesia Perwakilan DIY, Bank BPD DIY serta para pejabat Pemkot Yogya. Pada kesempatan itu turut diserahkan secara simbolis perangkat pendukung KKPD dan agen Laku Pandai BPD DIY. Heny mengaku kolaborasi yang dibangun bersama Bank BPD DIY serta Bank Indonesia melalui Tim

Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjadi tonggak penting dalam transformasi tersebut. Terutama melalui penggunaan layanan non tunai dalam setiap transaksi keuangan. "Percepatan digitalisasi melalui KKPD tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri," tandasnya. Sementara Direktur Umum PT Bank BPD DIY

Hudan Mulyawan, mengaku jajarannya memiliki komitmen kuat dalam mendukung digitalisasi daerah. Menurutnya, sebagai mitra strategis pemerintah daerah pihaknya akan berupaya menyediakan perangkat untuk memfasilitasi percepatan digitalisasi dan pembayaran atas belanja APBD. Apalagi KKPD sudah diluncurkan oleh Presiden RI sejak Agustus 2022 lalu dan juknisnya sudah diatur melalui Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.

Hudan mengungkapkan, dengan KKPD tidak hanya memperkuat transparansi melainkan juga muncul efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini karena semua transaksi secara otomatis tercatat dalam sistem dan bisa dilakukan secara ri-



KRE-Archivi Wahdan  
**Direktur Umum PT Bank BPD DIY Hudan Mulyawan (kanan) secara simbolis menyerahkan perangkat KKPD ke Pemkot Yogya.**

il time. "Ini juga akan mempercepat pembayaran oleh Pemkot kepada pihak ketiga sepanjang sudah ada tagihan," tandasnya. Oleh karena itu, pembayaran atas sebuah tagihan dengan KKPD tidak perlu

pelunasan kewajiban pembayaran ke pihak penerbit KKPD sesuai waktu yang telah disepakati secara sekaligus.

"Jadi proses pembayaran ke merchant bisa lebih cepat, kemudian pencatatannya juga lebih akurat dan akuntabel karena semua non tunai serta tercatat dalam sistem secara riil time," imbuhnya.

Perangkat yang dibutuhkan juga cukup sederhana. Pihak merchant harus memiliki QRIS terlebih dahulu. Selanjutnya pengguna anggaran yang telah diberikan kewenangan mengelola KKPD tinggal membayarkan tagihan melalui BPD DIY Mobile dengan menggunakan menu rekening KKPD pada saat itu juga. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005